



**PT PUPUK SRIWIDJAJA (Persero)**  
**(PUSRI HOLDING)**

**STATEMENT OF CORPORATE INTENT  
2003 - 2005**

**Jakarta, 21 Maret 2003**

**PT PUPUK SRIWIDJAJA (Persero)**  
**(PUSRI HOLDING)**

**Statement of Corporate Intent**  
**2003 – 2005**

**1. Pendahuluan**

Statement of Corporate Intent (SCI) ini disusun untuk yang kedua kalinya sebagai kelanjutan dari Pelaksanaan program Pengembangan SCI bagi 7 (tujuh) BUMN yang terpilih sebagai proyek percontohan untuk periode 2002 – 2004. Penyusunan SCI ini menunjukkan bahwa PT Pusri Holding mempunyai komitmen yang kuat untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG) seperti yang diamanatkan oleh Menteri BUMN melalui Surat Keputusan No. KEP-117/M-MBU/2002, tanggal 1 Agustus 2002. Secara khusus PT Pusri Holding senantiasa menjamin terselenggaranya penerapan Prinsip GCG yang meliputi : Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban dan Kewajaran.

SCI ini disusun berdasarkan keinginan dan tujuan PT Pusri Holding beserta Anak Perusahaannya, yang disampaikan oleh Direksi PT Pusri Holding atas persetujuan Dewan Komisaris untuk periode 2003 - 2005

**2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha**

Tujuan utama dari PT Pusri Holding seperti tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang industri, perdagangan, jasa dan angkutan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
2. Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan Kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Industri

Mengolah bahan-bahan mentah tertentu menjadi bahan-bahan pokok yang diperlukan guna pembuatan pupuk, terutama pupuk urea, Petrokimia dan bahan kimia lainnya, serta mengolah bahan pokok tersebut menjadi berbagai jenis pupuk dan hasil kimia lainnya;

b. Perdagangan

Menyelenggarakan kegiatan distributor dan perdagangan, baik dalam maupun luar negeri dan berhubungan dengan produk-produk tersebut di atas dan produk-produk lainnya serta Kegiatan impor barang-barang yang antara lain berupa bahan baku, bahan penolong/ pembantu, peralatan produksi dan bahan kimia lainnya.

c. Jasa

Melaksanakan studi Penilaian, Pengembangan, disain enjiniring, pengantongan (bagging station), konstruksi, manajemen, pengoperasian pabrik, perbaikan/ reparasi, pemeliharaan, konsultasi (kecuali konsultasi bidang hukum) dan jasa Teknis lainnya dalam sektor industri pupuk serta industri kimia lainnya.

d. Angkutan

Menjalankan Kegiatan-kegiatan usaha dalam bidang angkutan, ekspedisi dan pergudangan serta kegiatan lainnya yang merupakan sarana dan perlengkapan guna kelancaran Kegiatan-kegiatan usaha tersebut.

### 3. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan

#### Visi

Menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri pupuk, petrokimia dan jasa-jasa teknik melalui maksimasi nilai untuk perusahaan dan kepuasan pelanggan.

#### Misi

Memproduksi dan memasarkan pupuk untuk mendukung “Ketahanan Pangan Nasional (Swa Sembada Pangan)”, produk-produk kimia dan jasa-jasa teknik di pasar nasional dan global dengan memperhatikan aspek mutu secara menyeluruh.

#### Nilai-Nilai Perusahaan

Memberikan kepuasan kepada pelanggan dan masyarakat melalui produk dan pelayanan yang bermutu berlandaskan kepada 7 etos kerja, yaitu:

1. Bertindak segera (*Prompt Action*)
2. Responsif (*Responsive*)
3. Disiplin (*Discipline*)
4. Kerja Keras (*Hardwork*)
5. Kreatif (*Creative*)
6. Bersih (*Clean*)
7. Baik Sangka (*Be Positive*)

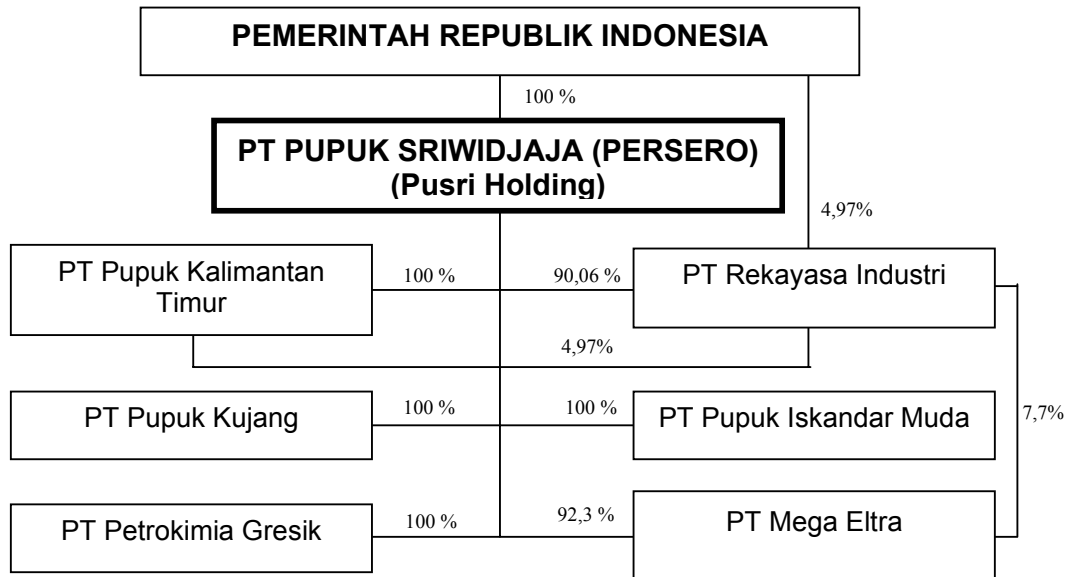
### 4. Sifat dan Lingkup Kegiatan Perusahaan

## Gambaran Umum Perusahaan

PT Pusri didirikan pada tahun 1959 di Palembang yang merupakan perusahaan penghasil pupuk Urea pertama di Indonesia. Pada tahun 1997 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1997, PT Pusri ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Induk Perusahaan atas BUMN pupuk yang berlokasi terpencar di beberapa daerah di Indonesia, terdiri dari PT Petrokimia Gresik di Gresik, PT Pupuk Kujang di Cikampek, PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang dan PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh. Anggota Pusri Holding lainnya adalah PT Rekayasa Industri yang lingkup bisnisnya meliputi bidang Engineering, Procurement dan Construction (EPC) serta PT Mega Eltra yang bergerak di bidang Trading. Kedua perusahaan tersebut berlokasi di Jakarta.

Pembentukan Pusri Holding merupakan langkah strategis guna terciptanya saling sinergi di dalam berbagai kepentingan/ kebutuhan diantara anggota Holding dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan daya saing industri pupuk Nasional di tengah-tengah era persaingan global.

## STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM



Pusri Holding mengoperasikan 12 unit pabrik Urea dan 11 unit pabrik Amoniak dengan total kapasitas terpasang sebesar 7,5 juta ton Urea dan 4,5 juta ton Amoniak per tahun. Selain itu Pusri Holding juga

mengoperasikan beberapa pabrik yang menghasilkan berbagai jenis pupuk lainnya dengan total kapasitas 650.000 ton ZA, 1 juta ton SP-36/TSP dan 300.000 ton pupuk majemuk Phonska.

Beberapa produk samping yang dihasilkan Pusri Holding terdiri dari Sulfuric Acid, Phosphoric Acid, Cement Retarder, Purified Gypsum dan Aluminum Fluoride dengan total kapasitas sebesar 1 juta ton. Pada tahun-tahun mendatang, pada saat pembangunan pabrik-pabrik baru (PIM 2 dan Kujang IB) telah rampung, maka total kapasitas terpasang akan meningkat menjadi 9 juta ton Urea dan 5,2 juta ton Amoniak per tahun.

Pusri Holding juga memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif pada jaringan distribusi dan pemasaran yang sepenuhnya ditunjang dengan fasilitas dan prasarana yang memadai, meliputi 23 Kantor Pemasaran Pusri Daerah (PPD); 176 Kantor Perwakilan Kabupaten (KPK), 4 Unit Pengantongan Pupuk (UPP) milik sendiri dan 1 Unit Pengantongan Pupuk yang disewa dari pihak swasta dengan total kapasitas 2,52 juta ton per tahun; 7 unit kapal curah milik Pusri dan 1 unit kapal sewa dengan total kapasitas angkut sebesar 66.500 ton; 1 unit kapal tanker Amoniak yang berkapasitas 5.500 ton; 595 gerbong pengangkut pupuk dengan total kapasitas 17.850 ton; 144 gudang milik dan 262 gudang sewa dengan total kapasitas 1,27 juta ton.

Sebagaimana diketahui untuk menjamin produksi pangan, pemerintah menerapkan subsidi pupuk sejak tahun 1970. Sejak tahun 1979 PT Pusri yang merupakan pioneer dan telah memiliki kapasitas produksi terbesar dan fasilitas distribusi terlengkap, ditunjuk oleh pemerintah sebagai distributor tunggal. Dari pihak pemerintah, yang mengawasi masalah distribusi ini adalah Departemen Perindustrian & Perdagangan.

Melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 93 tahun 2001, masing-masing produsen pupuk di lingkungan PT Pusri Holding diberikan tanggung jawab untuk memasarkan pupuk urea pada daerah-daerah sekitar pabriknya, baik perkebunan, industri maupun pertanian. Sedangkan PT Pusri tetap bertanggung jawab mengisi daerah-daerah selebihnya yang relative remote, dan tetap bertanggung jawab untuk seluruh Indonesia, karena posisinya sebagai Induk Perusahaan.

Pada tanggal 11 Februari 2003 telah terbit Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 70 tahun 2003, dimana rayonisasi berdasarkan wilayah propinsi. Untuk itu masing-masing produsen pupuk bertanggung jawab sebagai berikut :

#### **Pupuk Urea**

- PT PIM : Aceh, Sumut

- PT Pusri : Jateng, DKI, Banten, DI Yogyakarta, Kalbar, Sumbar, Jambi, Riau, Bengkulu, Sumsel, Bangka, Belitung, Lampung
- PT PKC : Jabar
- PT PKG : Jabar
- PT PKT : Bali, NTB, NTT, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Maluku, Sulsel, Sulut, Sultera, Sulteng, Gorontalo, Maluku Utara, Papua

### **Pupuk Non Urea**

PT Petrokimia Gresik : Seluruh Indonesia

Sejalan dengan strategi korporasi dalam menunjang produktivitas pertanian dalam negeri, PT Pusri Holding senantiasa lebih memprioritaskan kebutuhan pupuk dalam negeri dibandingkan dengan ekspor. Ekspor pupuk (Urea) baru dilaksanakan jika kebutuhan di dalam negeri sudah tercukupi. Sedangkan negara tujuan ekspor utama meliputi: Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, Jepang Taiwan dan Australia.

### **PRODUKSI DAN KONSUMSI PUPUK TAHUN 2000 – 2005**

(ton)

NO.	JENIS PUPUK	TAHUN	PROD	IMPOR	PENJUALAN DN	EKSPOR
1.	Urea	2000 *)	5.748.081	-	4.047.302	1.504.287
		2001 *)	5.199.756	-	4.129.360	959.152
		2002 *)	5.404.592	-	4.283.978	822.725
		2003 **)	6.108.000	-	4.905.697	1.188.066
		2004 ***)	7.289.500	-	5.106.125	2.183.375
		2005 ***)	7.305.500	-	5.242.570	2.062.930
2.	ZA	2000 *)	491.051	10.000	615.927	-
		2001 *)	441.063	57.167	619.640	-
		2002 *)	419.650	227.718	608.066	-
		2003 **)	615.000		708.950	-
		2004 ***)	615.000		565.000	-
		2005 ***)	715.000		570.000	-

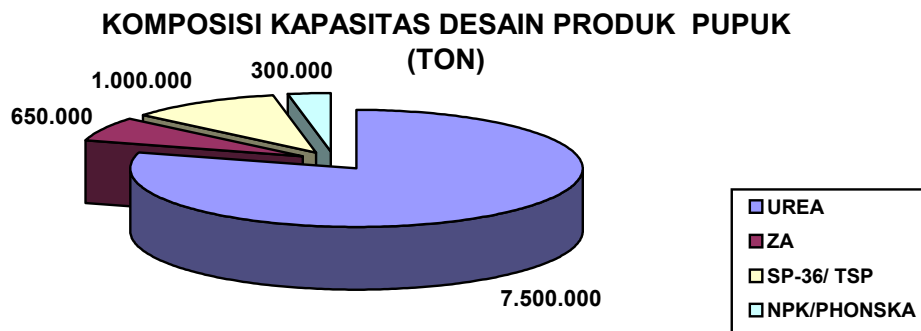
NO.	JENIS PUPUK	TAHUN	PROD	IMPOR	PENJUALAN DN	EKSPOR
3.	SP-36	2000 *)	519.626	114.087	652.255	-
		2001 *)	650.820		654.448	130
		2002 *)	552.984		637.163	-
		2003 **)	700.000		859.800	-
		2004 ***)	334.000		334.000	-
		2005 ***)	400.000		400.000	-
4.	PUPUK LAIN	2000 *)	30.096		281.757	-
		2001 *)	28.683		228.024	-
		2002 *)	105.560		356.096	39.263
		2003 **)	225.000		205.000	20.000
		2004 ***)	505.000		310.000	195.000
		2005 ***)	728.000		315.000	413.000

Keterangan:

\*) = Audited

\*\* ) = RKAP

\*\*\* ) = RJP



**PERKEMBANGAN NILAI PENJUALAN  
(DALAM NEGERI + EKSPOR)**

(Rp Juta)

Jenis Produk	Realisasi			PROYEKSI		
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
- Urea	4,700,183	4,995,122	5,061,805	6,223,588	6,897,602	6,912,777
- ZA	422,547	527,713	540,781	658,196	729,479	731,084
- SP-36	759,767	972,301	853,806	1,168,381	1,294,917	1,297,766
- Phonska	83,915	84,364	11,787	321,046	355,815	356,598
- DAP	-	-	57,805	59,012	65,403	65,547
- Pupuk lainnya	563,474	582,838	462,485	46,399	514,139	515,270

**Masalah Strategis yang dihadapi Pusri Holding:**

- Dengan adanya Keputusan Menteri Perindustrian & Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dimana masing-masing produsen pupuk bertanggung jawab atas Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di masing-masing rayon yang telah ditetapkan dalam SK tersebut, hal ini berdampak pada utilisasi sarana dan prasarana distribusi yang dimiliki oleh PT Pusri yang akan berpengaruh pada pencapaian kinerja PT Pusri.
- Kajian tentang restrukturisasi Holding PT Pusri yang masih dalam proses untuk menetapkan bentuk organisasi PT Pusri yang akan datang, akan sangat berpengaruh terhadap langkah sinergi antar BUMN Pupuk yang sekarang ini sudah mulai berjalan dengan baik.
- Belum finalnya negosiasi penetapan harga gas bumi dengan Pertamina untuk kebutuhan Kujang, Kaltim dan PIM.
- Implementasi atas beberapa program transformasi bisnis perusahaan yang meliputi:
  - o Pembaharuan 3 unit pabrik yang sudah tua (Pusri II, III dan IV) yang produktivitasnya sudah tidak memenuhi standar yang diharapkan.
  - o Commissioning pabrik baru (PIM-2 dan Kujang IB)
  - o Pengembangan perusahaan kedalam bentuk organisasi yang berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan.
- Pendanaan untuk perluasan pabrik PIM-2 dan Kujang-IB
- Harga jual pupuk ke petani yang ditetapkan oleh Pemerintah

- Masa depan privatisasi, yang diantaranya masih ditangguhkan sampai pasar domestik untuk Urea sudah betul-betul bebas sesuai mekanisme pasar.

### Sumber Daya Manusia

Penempatan Sumber Daya Manusia mempunyai peranan yang penting guna mewujudkan misi perusahaan. Komposisi SDM PT Pusri Holding pada tahun 2002 adalah sebagai berikut:

PERUSAHAAN	DOKTORAL	PASKA SARJANA	SARJANA	DIPLOMA	LAIN-LAIN	JUMLAH
PT PUSRI	-	54	825	270	2.167	3.316
PT PKG	-	23	496	119	3.169	3.810
PT PKC	-	31	158	58	657	904
PT PKT	-	25	391	118	1.807	2.341
PT PIM	-	12	85	75	935	1.107
PT REK	5	21	421	64	419	930
PT ME	-	6	67	29	50	152
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>172</b>	<b>2.443</b>	<b>733</b>	<b>9.204</b>	<b>12.557</b>

Usaha peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang terus menerus merupakan sasaran kunci perusahaan. Pusat pendidikan dan pelatihan telah dikembangkan sesuai dengan disain dan pengembangan program-program pelatihan. PT Pusri Holding juga telah memiliki program-program kesejahteraan karyawan berupa program dana pensiun, jaminan Kesehatan, perumahan, rekreasi, iuran dana pensiun, fasilitas pendidikan dan bea siswa bagi keluarga karyawan serta lingkungan dan pelayanan-pelayanan lainnya.

### Program Pengembangan Wilayah (Community Development)

Pembinaan Wilayah dilaksanakan melalui kegiatan:

- Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan Pembinaan Usaha Kecil & Koperasi (PUKK)
- Demplot dan Kemitraan untuk peningkatan produksi pertanian.

(dalam Rp. Juta)

Jumlah					
2000		2001		2002	
Bantuan Sosial Kemasyarakatan	PUKK	Bantuan Sosial Kemasyarakatan	PUKK	Bantuan Sosial Kemasyarakatan	PUKK
---	56.330	---	63.099	14.385	40.780

### 5. Ukuran Kinerja (Performance Measures)

Ukuran kinerja PT Pupuk Sriwidjaja ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, meliputi:

- a. Aspek Keuangan
- b. Aspek operasional
- c. Aspek Administrasi

Penilaian tersebut akan dilakukan mengacu pada laporan keuangan hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar.

### Kinerja Keuangan

	Satuan	2002	2003	2004	2005
Return on Equity (ROE)	%	55,12	28,74	33,45	32,28
Return on Investment (ROI)	%	15,38	11,59	15,40	15,62
Cash Ratio	%	49,56	14,81	15,99	17,27
Current Ratio	%	1,48 : 1	1,28 : 1	1,31 : 1	1,34 : 1
Collection Period	Hari	33,66	38,79	32,50	30,14
Perputaran Persediaan	Hari	74,02	38,21	31,03	29,41
Total Assets Turn Over (TATO)	%	89,33	107,61	117,73	117,06
Total Modal Sendiri thd Total Assets	%	14,02	14,71	14,54	15,02

### Kinerja Operasional

URAIAN	2003	2004	2005
<b>Efisiensi Produksi:</b>	100%	100%	100%
<u>Realisasi Konsumsi &amp; Harga Bahan Baku</u> Anggaran Konsumsi & Harga Bahan Baku	Baik sekali	Baik sekali	Baik sekali
<b>Produksi dan Pengadaan:</b>	100%	100%	100%
<u>Realisasi Produksi dan Pengadaan Pupuk</u> Anggaran Produksi dan Pengadaan Pupuk	Baik sekali	Baik sekali	Baik sekali
<b>Produktivitas Tenaga Kerja:</b>	100%	100%	100%
<u>Total Nilai Penjualan</u> Jumlah Tenaga Kerja	Baik sekali	Baik sekali	Baik sekali
<b>Keselamatan Kerja:</b>	100%	100%	100%
Penilaian dari Lembaga K3 Independen	Baik sekali	Baik sekali	Baik sekali

### Kinerja Administrasi

URAIAN	2003	2004	2005
--------	------	------	------

- Penyerahan Laporan Tahunan	< 4 bulan	< 4 bulan	< 4 bulan
- Penyerahan Rancangan RKAP	> 2 bulan	> 2 bulan	> 2 bulan
- Penyerahan Laporan Periodik	< 30 hari	< 30 hari	< 30 hari
- Kinerja PUKK			
<b>Efektifitas Penyaluran Dana:</b> $\frac{\text{Jumlah dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah Dana yang tersedia}} \times 100\%$	> 90%	> 90%	> 90%
<b>Tingkat Kolektibilitas Pinjaman:</b> Rata-rata tertimbang <u>Kolektibilitas pinjaman PUKK</u> Jml Pinjaman yang disalurkan	Lancar	Lancar	Lancar

## 6. Ratio Dana Pemegang saham

(Rp. 000)

	2002	2003	2004	2005
TOTAL KEWAJIBAN	8.850.597.158	9.312.813.851	9.312.813.851	9.312.813.851
TOTAL MODAL SENDIRI	6.709.804.250	7.306.928.301	7.404.507.295	7.502.385.600
TOTAL KEWAJIBAN & MODAL	15.560.401.408	16.619.742.152	16.717.321.146	16.815.199.451
TOTAL AKTIVA	15.560.401.408	16.619.742.152	16.717.321.146	16.815.199.451
DER	57 : 43	56 : 44	56 : 44	55 : 45

## 7. Informasi yang harus dilaporkan

Dokumen yang harus dilaporkan kepada Pemegang saham antara lain:

- Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP = Annual Budget).

RKAP ditetapkan dan disetujui oleh Pemegang saham sebagai pedoman Operasional perusahaan untuk tahun yang akan datang.

- Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP = Corporate Plan).

RJP ditetapkan dan disetujui Pemegang saham sebagai pedoman Operasional perusahaan untuk 5 tahun yang akan datang.

- Laporan bulanan kinerja perusahaan, laporan ini menginformasikan tentang kegiatan di masing-masing Direktorat dan Kegiatan Anak Perusahaan serta Perusahaan Patungan untuk periode bulanan.

- Laporan Triwulan Kinerja Perusahaan. Laporan ini berisi ringkasan kegiatan Operasional triwulan dilengkapi informasi yang berkaitan

dengan kinerja keuangan dan non-keuangan untuk periode 3 bulanan.

- e. Laporan semester. Laporan ini berisi kinerja keuangan, posisi keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas yang dilengkapi informasi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan untuk periode 6 bulan.
- f. Laporan keuangan konsolidasi (Audited). Laporan ini berisi laporan kinerja keuangan, posisi keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas untuk PT Pusri Holding yang terkonsolidasi dengan anak perusahaan dilengkapi informasi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan.
- g. Laporan Tahunan (Un-Audited). Laporan ini menginformasikan tentang Gambaran Umum Perusahaan yang meliputi Bidang Pemasaran, Bidang Produksi, Bidang Keuangan, Bidang Sumber Daya Manusia, Bidang Teknik dan Pengembangan, Bidang Pengelolaan Lingkungan, Bidang Pembinaan Usaha Kecil & Koperasi, Bidang Anak Perusahaan / Perusahaan Patungan yang belum diperiksa oleh akuntan publik dan hanya untuk kebutuhan intern.

#### 8. Kebijakan Dividen (Dividend Policy)

Keuntungan yang PT Pusri Holding digunakan untuk investasi dan operasional perusahaan diharapkan dapat menyalurkan dana yang masih mencukupi untuk dibagikan kepada Pemegang saham.

Besarnya pembayaran dividen yang diusulkan oleh Direksi kepada Pemegang saham akan dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. Kebutuhan pengeluaran untuk aktiva tetap jangka Menengah.
- b. Kebutuhan untuk memperbaiki struktur modal
- c. Kebutuhan modal kerja.

Namun demikian disamping mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas, Mengingat kondisi perekonomian khususnya sektor industri dan dalam upaya pemupukan dana cadangan perusahaan, PT Pusri Holding bermaksud untuk melakukan pembayaran dividen sebagai berikut:

(dalam Rp Milyar)

URAIAN	REALISASI			PROYEKSI		
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Dividen dari Laba Bersih tahun sebelumnya *)	507,87 (43,75%)	401,95 (50%)	282,69 (35%)	297,24 (35%)	315,01 (35%)	285,48 (35%)

\*) Tidak termasuk pembagian laba untuk bonus / tantiem / ME / dana PUKK / dana pembinaan wilayah

Sebagai BUMN, PT Pusri Holding bertanggung jawab membantu Pengembangan pengusaha kecil dan koperasi serta Pembinaan wilayah. PT Pusri Holding mengalokasikan dana sampai 5% laba bersih untuk keperluan tersebut.

Dana untuk keperluan ini diambil dari dividen yang dibayarkan kepada pemerintah dan dikelola oleh PT Pusri Holding, sebelum dana disalurkan dalam Bentuk hibah dan pinjaman kepada pengusaha kecil dan koperasi serta Pembinaan wilayah.

## **9. Penerapan Good Corporate Governance**

Komitmen organ perseroan PT Pusri (Persero) yang meliputi Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris dalam penerapan Good Corporate Governance, tercermin dalam:

- RKAP PT Pusri tahun 2002 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham.
- Risalah RUPS tentang RKAP PT Pusri tahun 2002
- Surat Edaran Direktur Utama PT Pusri tanggal 19 Desember 2000 tentang kebijakan penerapan Good Corporate Governance di PT Pusri (GCG-Pusri)
- Pembentukan Tim penerapan Good Corporate Governance PT Pusri (GCG-Pusri) pada Januari 2001
- Kontrak Manajemen antara PT Pusri selaku Pemegang Saham dengan Direksi Anak Perusahaan pada saat RUPS Luar Biasa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Anak Perusahaan pada bulan Juni 2001.
- Surat Edaran Direktur Utama PT Pusri tanggal 28 Desember 2001 tentang penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance untuk praktek bisnis di PT Pusri.
- Pencanangan tahun 2003 sebagai tahun Good Corporate Governance PT Pusri dan penandatanganan komitmen penerapan Good Corporate Governance PT Pusri oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama disaksikan oleh Sekretaris Kementerian BUMN pada tanggal 21 Nopember 2002.

## Pola Penerapan Good Corporate Governance PT Pupuk Sriwidjaja (GCG-Pusri)

### Tahap I : 2001

**Sasaran:**

Pemahaman secara mendalam tentang GCG oleh manajemen kunci

### Tahap II : 2002

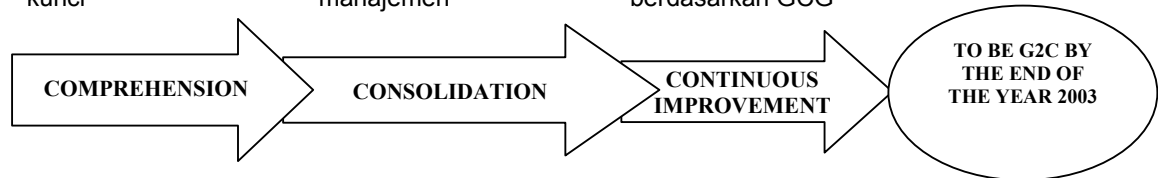
**Sasaran:**

Pembangunan sarana dan prasarana GCG-Pusri dan komitmen manajemen

### Tahap III : 2003

**Sasaran:**

Menjadi perusahaan yang memiliki kompetensi dalam praktek bisnis berdasarkan GCG



**Indikator Keberhasilan**

- Terlaksananya seminar/ briefing tentang GCG ke pada Top Manajemen
- Terbentuknya Tim GCG Pusri
- Tersusunnya Kerangka Dasar Code of Conduct GCG Pusri
- Teridentifikasinya Governance Issue/ Proses Bisnis Unit Kerja (Self Assessment)

**Indikator Keberhasilan**

- Tersusunnya Peta Praktek GCG Pusri
- Tersusunnya Code of Conduct GCG-Pusri
- Terlaksananya pembuatan Website GCG-Pusri
- Terlaksananya sosialisasi dan training GCG kepada Top Manajemen dan Senior Manajemen
- Komitmen Top Manajemen menerapkan GCG di PT Pusri

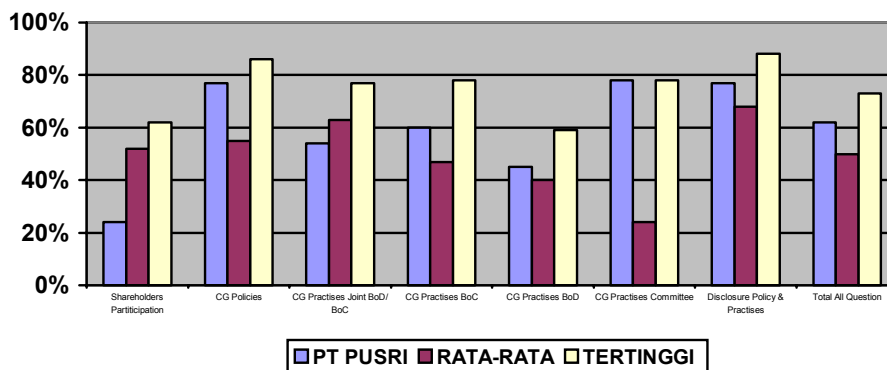
**Indikator Keberhasilan**

- Terlaksananya penerapan prinsip2 GCG dalam praktek bisnis berdasarkan konsep continuous improvement
- Terlaksananya pembelajaran & pengajaran (Learning & Sharing) GCG melalui jaringan internet
- Terlaksananya sosialisasi GCG-Pusri kepada seluruh pimpinan dan karyawan
- Terlaksananya sosialisasi GCG-Pusri kepada Stakeholders
- Terlaksananya Audit/ Assessment GCG-Pusri

**Peta Posisi Penerapan GCG-Pusri s.d. tahun 2002**

Tahap I 2001	Tahap II 2002	Tahap III 2003
Rencana	Kinerja	Prognosa
<b>Comprehension - Consolidation</b>		<b>To be G 2 C BY THE END OF THE YEAR 2003</b>
<b>Continuous Improvement</b>		
<b>Sasaran 2001:</b> Pemahaman secara mendalam tentang GCG oleh manajemen kunci.		
<b>Indikator keberhasilan 2001:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya Seminar/ Briefing tentang GCG kepada Top Management.</li> </ul>	100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya Tim GCG-Pusri</li> </ul>	100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya Training GCG kepada Tim GCG Pusri</li> </ul>	100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersusunnya Kerangka Dasar Code of Conduct GCG-Pusri</li> </ul>	100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teridentifikasinya Governance Issues/ Proses Bisnis Unit Kerja (Self-Assesment)</li> </ul>	100%	
<b>Total</b>	100%	
<b>Sasaran 2002:</b> Pembangunan Sarana dan Prasarana GCG-Pusri.		
<b>Indikator Keberhasilan 2002:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersusunnya Peta Praktek GCG-Pusri</li> </ul>	100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersusunnya Code of Conduct GCG-Pusri</li> </ul>	100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersusunnya Board Manual GCG-Pusri</li> </ul>	100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya Audit/ Asesmen GCG-Pusri</li> </ul>	100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya pembuatan Website GCG-Pusri</li> </ul>	100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya Sosialisasi dan Traianing GCG-Pusri kepada Top Management dan Senior Management.</li> </ul>	100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen Top Management menerapkan GCG di PT Pusri</li> </ul>	100%	
<b>Total</b>	100%	

**PT PUSRI CORPORATE GOVERNANCE SURVEY QUESTIONAIRE**



Sumber : Price Waterhouse Coopers

**Hasil Pemetaan Praktek GCG-PUSRI**

MASALAH	PENILAIAN CORPORATE GOVERNANCE			
	BAIK	PERLU PENINGKATAN	PERLU PERBAIKAN	BURUK
Struktur Kepemilikan dan pengaruhnya			<b>X</b>	
Hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki klaim finansial	<b>X</b>			
Transparansi Finansial dan Pengungkapan Informasi	<b>X</b>			
Struktur dan proses Dewan Komisaris & Direksi		<b>X</b>		
Manajemen resiko dan Perencanaan strategis			<b>X</b>	
Kepentingan Stakeholder lain	<b>X</b>			

Sumber : Sofyan Djalil & Partners

**Pernyataan Komitmen Penerapan Good Corporate Governance PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)**

1. Mengelola Perusahaan secara amanah, jujur dan adil serta senantiasa menjunjung tinggi etos kerja dalam rangka mencapai visi, misi dan Sasaran Perusahaan.
2. Meningkatkan nilai Perusahaan secara berkelanjutan, dengan menerapkan manajemen risiko dan manajemen pengelolaan secara berhati-hati (prudent) sesuai dengan asas kelangsungan usaha perseroan.

3. Menempatkan semua pihak yang terkait dengan perusahaan (Stakeholders) sebagai mitra kerja yang harmonis dan efektif dalam mencapai Tujuan Perusahaan dengan saling menguntungkan.
4. Mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara memadai sesuai dengan peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menggunakan kewenangan, harta, fasilitas serta sumberdaya perusahaan semata-mata untuk sesuatu yang bermanfaat demi memajukan kepentingan perusahaan dan tidak menggunakannya untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan perusahaan.
6. Melakukan pengambilan keputusan yang efektif & efisien dengan penuh tanggung jawab serta menjauhkan diri dari tindakan menerima dan atau memberikan suap, komisi, hadiah dan pemberian lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
7. Menumbuhkan budaya perusahaan sesuai dengan Code of Conduct PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) serta senantiasa bertindak sebagai warga negara yang baik dengan mematuhi penegakan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

## **10. Prosedur Pengadaan**

PT Pusri Holding menerapkan prosedur pengadaan barang dan jasa, dengan berpijak kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Perusahaan akan menjamin bahwa pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara transparan, objektif dan adil (wajar)
- Perusahaan akan melaksanakan prosedur tender untuk mendapatkan hasil yang paling menguntungkan perusahaan.
- Pelaksanaan tender akan dilaksanakan atas dasar prinsip non-diskriminasi.

Tata cara Pengadaan barang dan jasa di PT Pusri mengacu kepada Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/DIR/77/2001 tanggal 28 Mei 2001 tentang Penyempurnaan Prosedur Operasional Baku (POB) Pengadaan Barang dan Jasa di PT Pupuk Sriwidjaja, dengan mengacu kepada Keputusan Presiden RI Nomor 18 tahun 2000, tertanggal 21 Februari 2000.

Tata cara Pengadaan barang dan jasa seperti dalam tabel berikut:

<b>NILAI PEKERJAAN/ PENGADAAN</b>	<b>PENETAPAN REKANAN</b>	<b>JUMLAH REKANAN</b>	<b>KUALIFIKASI REKANAN</b>	<b>PENGIKATAN</b>
S.D. 100 Juta	Penunjukan Langsung/ Pelelangan Terbatas	3 rekanan/ pembandingan	K3	Surat Perintah Kerja (SPK)/ Kontrak
100 Juta s.d. 400 Juta	Pelelangan Terbatas	Minimal 3 rekanan	K2	Order Pembelian/ Order Kerja/ Kontrak
400 Juta s.d. 1 Milyar	Pelelangan Umum	Minimal 3 rekanan	K1	Order Kerja/ Order Pembelian/ Kontrak
1 Milyar s.d. 3 Milyar	Pelelangan Umum	Semua rekanan	M2	Order Kerja/ Order Pembelian/ Kontrak
3 Milyar s.d. 10 Milyar	Pelelangan Umum	Semua rekanan	M1	Order Kerja/ Pembelian/ Kontrak
10 Milyar ke atas	Pelelangan Umum	Pelelangan Umum	B	Order Kerja/ Pembelian/ Kontrak

**Keterangan :**

- K3** : Pengusaha Kecil dan Koperasi Golongan 3      **M2** : Pengusaha Menengah dan Koperasi Menengah Golongan 2
- K2** : Pengusaha Kecil dan Koperasi Golongan 2      **M1** : Pengusaha Menengah dan Koperasi Menengah Golongan 1
- K1** : Pengusaha Kecil dan Koperasi Golongan 1      **B** : Pengusaha Besar dan Koperasi Besar

**11. Kebijakan Akuntansi**

**11.1. Asumsi Dasar**

Laporan keuangan perusahaan disusun dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan. Oleh karena itu dasar penyusunannya menggunakan asumsi dasar (basic assumptions) sebagai berikut:

a. Dasar Accrual (Accrual Basis)

Semua pengaruh Transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat kejadian (dan bukan hanya mendasarkan pada saat kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam Catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan periode bersangkutan, sehingga laporan tidak hanya menginformasikan Transaksi penerimaan dan pembayaran kas masa lalu, tetapi juga Kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.

b. Kelangsungan Usaha (Going Concern)

Laporan keuangan disusun atas dasar asumsi kelangsungan Usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya di masa depan, oleh karenanya perusahaan diasumsikan tidak bermaksud melikuidasi atau mengurangi skala usahanya secara material. Bila maksud tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

### **11.2. Penyajian Laporan Keuangan**

- a. Laporan keuangan perusahaan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- b. Laporan keuangan konsolidasi perusahaan disusun berdasarkan harga perolehan.
- c. Laporan arus kas konsolidasian disusun berdasarkan metode langsung (direct method) dengan mengklasifikasikan dana dari kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.
- d. Konsolidasi mencakup anak perusahaan yang Kepemilikan sahamnya oleh perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung lebih dari 50% atau kurang, namun dapat dibuktikan adanya pengendalian.
- e. Angka pada laporan keuangan konsolidasi dibulatkan dan dinyatakan dalam ribuan rupiah.

### **11.3. Penggunaan Estimasi**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan Kewajiban serta pengungkapan aktiva dan Kewajiban kontinjen pada tanggal laporan keuangan serta jumlah Pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

## **12. Prosedur Penjualan dan Pembelian Saham atau Asset**

Direksi, setelah berkonsultasi dengan Komisaris akan mengajukan permohonan persetujuan kepada Pemegang Saham, sebelum :

- Membeli saham atau melakukan penyertaan pada bidang Usaha di luar bisnis inti (Core Business) sebagaimana dijelaskan dalam Statement of Corporate Intent (SCI) ini.
- Membeli saham atau melakukan penyertaan pada bidang Usaha yang bernilai cukup material bagi perusahaan.

Apabila PT Pusri atau anak perusahaan akan memiliki saham 20% atau lebih pada suatu perusahaan atau lebih pada suatu perusahaan yang berjalan menjadi anak perusahaan PT Pusri, maka PT Pusri atau anak perusahaannya tidak boleh membeli saham tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari Pemegang saham. PT Pusri harus memperoleh persetujuan dari Pemegang saham sebelum mengadakan / membentuk Usaha patungan.

### 13. Perkiraan Nilai Perusahaan (Estimate Value)

Perkiraan nilai perusahaan tahun 2003 s.d. 2005 yang dihitung dengan Metode Economic Value Added (EVA) ® adalah sebagaimana table berikut :

(DALAM RP MILYAR)

TAHUN	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Laba Bersih Sebelum Biaya Bunga	1.422,98	1.185,10	1.390,09	1.669,48	1.829,96	1.833,58
Biaya Bunga	156,15	178,24	260,40	407,03	511,03	550,30
Biaya Ekuitas (Dividen)	507,87	401,95	282,69	297,24	315,01	285,48

® Stern and steward

Jakarta, 21 Maret 2003

Deputi Bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas  
Percetakan dan Penerbitan Kementerian BUMN

  
Muwardi P. Simatupang

PT PUPUK SRIWIDJAJA (Persero)

  
Wardijasa  
Komisaris Utama

  
Zaenal Soedjais  
Direktur Utama

## Kebijakan Akuntansi

### 1. Penyajian laporan keuangan

- a. Laporan keuangan yang disusun meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.
- b. Laporan disajikan dalam mata uang rupiah dan jumlah mata uang yang disebut dalam laporan keuangan dibulatkan dalam ribuan rupiah.

### 2. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi yang disusun mencakup laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh induk perusahaan di atas 50%, sebagai berikut:

Nama perusahaan	Prosentase penyertaan
<b>Anak perusahaan PT Pusri</b>	
- PT Pupuk Kujang	100,00%
- PT Pupuk Iskandar Muda	100,00%
- PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk	100,00%
- PT Petrokimia Gresik	100,00%
- PT Rekayasa Industri	90,06%
- PT Mega Eltra	
<b>Anak perusahaan PT Pupuk Kujang</b>	
- PT Kawasan Industri Kujang Cikampek	96,19%
<b>Anak perusahaan PT Petrokimia Gresik</b>	
- PT Petrosida Gresik	99,99%
- PT Petrokimia Kayaku	60,00%
<b>Anak perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur</b>	
- PT Kaltim Industrial Estate	100,00%
<b>Anak perusahaan PT Rekayasa Industri</b>	
- SDN BHN - Malaysia	100,00%
- PT Yasa Industri Nusantara	80,00%
<b>Anak perusahaan PT Mega Eltra</b>	
- PT Sigma Utama	100,00%

Sisa kepemilikan saham PT Rekayasa Industri sebesar 9,94% merupakan kepemilikan dari PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk dan Pemerintah Republik Indonesia masing-masing sebesar 4,97%.

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban,

ekuitas, pendapatan dan beban. Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.

Apabila tidak mungkin digunakan kebijakan akuntansi yang sama dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, akan diungkap penggunaan kebijakan akuntansi yang berbeda tersebut, beserta proporsi unsur yang terkait dengan kebijakan akuntansi tersebut terhadap unsur sejenis dalam laporan keuangan konsolidasi (PSAK No. 4 paragraf 11 dan 24)

### 3. Transaksi dalam mata uang asing

- a. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi dan pos-pos aktiva serta kewajiban moneter dalam mata uang asing terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang USD, selanjutnya dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal neraca setiap bulan.
- b. Keuntungan atau kerugian yang timbul akibat penjabaran valuta asing ke dalam mata uang rupiah dibukukan pada laba atau rugi tahun buku yang bersangkutan dalam kelompok pendapatan atau beban-beban lain.
- c. Kurs mata uang asing utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

<b>MATA UANG</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
USD 1	9.500	10.000	9.500

### 4. Investasi jangka panjang

Penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain dinilai dengan metode sebagai berikut :

- a. Metode harga pokok (cost method) apabila saham yang dimiliki 20% atau lebih dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen perusahaan yang sahamnya dimiliki, sedangkan dividen yang diperoleh dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
- b. Metode pemilikan (equity method), apabila saham yang dimiliki 20% atau lebih dan mempunyai pengaruh signifikan atas investee kecuali dibuktikan sebaliknya.

Bagian proporsional dari laba/rugi anggota holding pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan/ beban lain-lain dan menambah (mengurangi) nilai penyertaan.

- c. Yang dimaksud dengan pengaruh signifikan, antara lain sebagai berikut:
- Mempunyai hak suara yang lebih dari 50% berdasarkan suatu Perjanjian dengan investor lain.
  - Mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau Perjanjian.
  - Mampu Menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan
  - Mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

#### **5. Piutang dan penyisihan piutang**

- a. Piutang usaha diakui berdasarkan bukti-bukti antara lain faktur, surat Pengeluaran Barang (SPB), berita acara serah terima barang dan laporan pengapalan (B/L).
- b. Piutang klaim dicatat setelah ada persetujuan besarnya klaim oleh perusahaan asuransi, pengangkatan atau pihak ketiga lainnya dengan mengkredit pendapatan lain-lain.
- c. Penyisihan piutang yang tidak tertagih (kecuali untuk piutang yang tidak ada jaminannya, piutang kepada Pemerintah dan piutang antar produsen pupuk) diatur sebagai berikut:
- Saldo piutang masing-masing debitur tidak bergerak atau tidak ada mutasi pembayaran satu sampai dua tahun disisihkan sebesar 50%.
  - Saldo piutang masing-masing debitur tidak bergerak atau tidak ada mutasi pembayaran lebih dari dua tahun disisihkan sebesar 100%.
  - Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
  - Khusus untuk piutang kepada Pemerintah, disisihkan setelah adanya kepastian bahwa piutang tersebut tidak akan terealisasi.

#### **6. Persediaan barang jadi.**

- a. Persediaan barang jadi di pabrik dihitung berdasarkan metode rata-rata tertimbang biaya produksi dan pada akhir tahun nilai persediaan dihitung sesuai hasil perhitungan fisik (stock taking)
- b. Nilai persediaan barang jadi di Unit Pengantongan Pupuk (UPP) dan Pemasaran Pusri Daerah (PPD) dihitung berdasarkan metode rata-rata harga penyerahan per jenis pupuk.

Apabila terjadi selisih antara hasil perhitungan fisik (stock taking) dengan administrasinya, maka selisih lebih atau kurang mengoreksi nilai persediaan akhir dan dicatat pada Perkiraan pendapatan atau biaya lain-lain.

- c. Nilai persediaan pupuk hasil produksi dalam negeri dihitung berdasarkan harga rata-rata pembelian pupuk dari masing-masing produsen sesuai syarat-syarat penyerahan yang telah disepakati dalam kontrak jual beli.
- d. Nilai persediaan pupuk eks impor dihitung berdasarkan harga rata-rata pembelian pupuk dari produsen luar negeri (impor sendiri) atau importir niaga ditambah biaya-biaya lokal sampai di gudang lini II pelabuhan utama (mainport).

#### **7. Persediaan barang setengah jadi, bahan baku dan bahan pembantu**

- a. Nilai persediaan barang setengah jadi dihitung berdasarkan metode rata-rata biaya produksi.
- b. Persediaan bahan baku dan bahan pembantu dibukukan berdasarkan harga perolehannya (at cost), pemakaiannya dihitung dengan metode rata-rata.

#### **8. Persediaan suku cadang**

- a. Persediaan suku cadang dibukukan berdasarkan harga perolehannya (at cost) sedangkan pemakaiannya dihitung dengan metode rata-rata.
- b. Penurunan nilai persediaan dilakukan dengan cara pembebanan langsung. Terhadap persediaan suku cadang yang telah dinyatakan rusak atau secara teknis tidak dapat digunakan (usang) sesuai dengan hasil perhitungan fisik (stock taking), sebelum mendapatkan persetujuan formal untuk menghapuskannya, dilakukan penyisihan sebesar 100% dari nilai suku cadang bersangkutan dan disajikan dalam kelompok aktiva lain-lain dengan menyisakan nilai buku Rp. 1,00.
- c. Suku cadang yang diperbaiki sehingga dapat berfungsi kembali, dibukukan sebagai persediaan sebesar nilai perolehannya kembali (nilai repair dan nilai lainnya sehingga suku cadang tersebut siap untuk difungsikan).
- d. Persediaan suku cadang dan bahan pembantu yang tidak bergerak lebih dari empat tahun diklasifikasikan sebagai persediaan suku cadang dan bahan pembantu yang lama bergerak (slow moving) dan dikelompokkan pada laporan keuangan sebagai aktiva lain-lain.

## **9. Aktiva tetap dalam pelaksanaan.**

- a. Pengeluaran atau pembebanan biaya dalam rangka pembangunan atau pembuatan aktiva yang masih dalam tahap persiapan atau penyelesaian dibukukan sebagai aktiva dalam pelaksanaan dan disajikan dalam kelompok aktiva tetap.

Pada saat proyek telah selesai dan dinyatakan beroperasi secara komersial berdasarkan berita acara rampung (close out report), maka atas investasi tersebut pencatatannya dialihkan sebagai aktiva tetap dan disusutkan sesuai dengan penggolongannya, mulai sejak proyek tersebut dinyatakan telah beroperasi secara komersial.

- b. Sisa material dari proyek yang telah selesai dipindahkan ke persediaan rutin dengan nilai Rp 1,00.

## **10. Aktiva tetap dan penyusutan**

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (PSAK no. 16, Paragraph 05).

### **a. Pengakuan Aktiva Tetap**

- a) suatu benda berwujud harus diakui sebagai aktiva tetap dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap bila:

- Besar kemungkinan (Probable) bahwa manfaat keekonomian di masa mendatang berkaitan dengan aktiva tersebut dan mengalir ke dalam perusahaan.
- Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal.

- b) Batasan penetapan aktiva tetap (Capital expenditure and revenue expenditure) disesuaikan dengan kebijakan masing-masing anggota holding.

### **b. Penyusutan**

Penyusutan aktiva tetap kelompok bangunan dihitung berdasarkan metode garis lurus (straight line method), --- prosentase tetap dari nilai perolehan---, sedangkan penyusutan aktiva tetap lainnya dihitung berdasarkan metode garis lurus dan metode menurun berganda (double declining method), --- prosentase tetap dari nilai buku, --- sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 (Undang- Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984).

- c. Aktiva tetap dalam bentuk siap pakai yang diperoleh melalui pembelian, dinilai berdasarkan harga perolehannya, yaitu harga beli ditambah semua biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka

menempatkan aktiva tersebut pada kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan dan dicatat berdasarkan berita acara penerimaan aktiva tetap yang bersangkutan.

- d. Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara membangun sendiri, dinilai berdasarkan harga perolehannya, yang dipindahbukukan dari aktiva dalam pelaksanaan dan dicatat berdasarkan close out report dan berita acara serah terima dari penanggung jawab pembangunan atau pembuatan aktiva tetap bersangkutan.
- e. Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara pembangunan yang dilakukan oleh pihak ketiga, dinilai berdasarkan harga perolehannya yang dipindahbukukan dari aktiva dalam pelaksanaan dan dicatat berdasarkan berita acara serah terima dari pihak ketiga (pemborong) bersangkutan.

#### **11. Pengakuan aktiva pajak tangguhan (PSAK No. 46, paragraph 66)**

Aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang, kecuali aktiva pajak tangguhan yang timbul dari:

- a. Goodwill negatif yang diakui sebagai pendapatan tangguhan sesuai dengan PSAK No. 22 tentang akuntansi penggabungan usaha.
- b. Pengakuan awal aktiva atau kewajiban suatu transaksi yang:
  - Bukan transaksi penggabungan usaha
  - Tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun fiskal.

#### **12. Pengakuan kewajiban pajak tangguhan (PSAK No. 46, paragraph 65)**

Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak.

- a. Dari goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal.
- b. Pada saat pengakuan awal aktiva atau kewajiban suatu transaksi yang:
  - Bukan transaksi penggabungan usaha.
  - Pada saat transaksi, tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun fiskal.

### **13. Biaya ditangguhkan**

- a. Biaya pra operasi, perbaikan dan sewa.

Pengeluaran perusahaan atas biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dibukukan sebagai biaya yang ditangguhkan dan diamortisasikan berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan masa manfaat.

- b. Biaya dana pensiun

Perusahaan induk dan perusahaan anak menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (PPMP) untuk seluruh karyawannya.

Besarnya iuran karyawan peserta dan perusahaan setiap bulan sesuai kebijakan masing-masing perusahaan. Kewajiban perusahaan atas perubahan masa gaji pokok karyawan (past service liabilities) atau sesuai penilaian aktuaris bahwa perusahaan perlu melakukan penyeteroran, diamortisasikan berdasarkan metode garis lurus.

### **14. Aktiva yang tidak atau belum dipakai**

- a. Aktiva yang belum dipakai dalam operasional perusahaan dicatat dalam Perkiraan aktiva tetap.
- b. Aktiva tetap yang tidak digunakan lagi untuk operasional perusahaan (karena rusak atau usang), sebelum mendapat persetujuan formal untuk menghapuskannya, secara administrative dikeluarkan dari Perkiraan aktiva tetap untuk dipindahbukukan ke dalam kelompok aktiva lain-lain.
- c. Terhadap aktiva tetap tersebut dilakukan penyusutan sekaligus sebesar nilai buku dan dibebankan sebagai biaya lain-lain.

### **15. Aktiva penyangga**

- a. Aktiva yang diklasifikasikan sebagai aktiva penyangga disajikan pada aktiva tetap, kriteria aktiva penyangga tersebut adalah:
- Aktiva yang pemakaiannya tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
  - Nilainya cukup materil sesuai batasan capital expenditure and revenue expenditure (CERE)
  - Sulit untuk mendapatkannya.
  - Bila tidak ada akan mengganggu kelancaran produksi.
- b. Aktiva penyangga ini akan disusutkan sepanjang satu periode waktu yang tidak melebihi masa manfaat dari aktiva tetap yang berhubungan (disusutkan selama sisa umur ekonomis aktiva induknya)

- c. Apabila aktiva penyangga yang sudah diamortisasi, dipakai dan masih mempunyai nilai buku, dibukukan dengan mendebet Perkiraan akumulasi aktiva induk.

#### **16. Biaya selama masa pelaksanaan proyek**

- a. Biaya selama pelaksanaan proyek terdiri atas biaya labor, biaya material dan biaya overhead.
- b. Biaya labor dan material langsung dibukukan sebagai nilai construction in progress (CIP), sedangkan biaya overhead yang dialokasikan ke nilai CIP hanya overhead yang berkaitan langsung dengan kegiatan proyek.
- c. Bunga selama masa Konstruksi (interest during construction) dikapitalisasi sebagai bagian dari nilai CIP dengan perlakuan sebagai berikut:
  - a) Bunga yang dikapitalisasi berasal dari pinjaman yang memang ditujukan untuk membiayai proyek yang bersangkutan.
  - b) Dalam hal satu pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa proyek, maka beban bunga ke masing-masing proyek dihitung secara proporsional berdasarkan realisasi penambahan biaya proyek yang bersangkutan.
  - c) Periode kapitalisasi bunga dimulai dengan adanya pembayaran atau pembebanan pertama atas bunga pinjaman untuk proyek yang bersangkutan dan terus berlanjut sampai dengan selesainya proyek tersebut.

#### **17. Hutang pajak**

- a. Jumlah pajak penghasilan (PPh) badan yang harus dilunasi oleh perusahaan atas perolehan laba kena pajak selama tahun berjalan setelah diperhitungkan (dikompensasikan) dengan pajak penghasilan dibayar di muka, dibukukan sebagai hutang pajak.
- b. Pajak-pajak penghasilan yang lain yang telah dipungut tetapi belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal penutupan buku, dibukukan sebagai hutang pajak.
- c. PPN keluaran yang masih harus disetor sebesar hasil kompensasi antara PPN keluaran terhutang dengan PPN masukan yang dapat dikreditkan, dibukukan sebagai hutang pajak.

## **18. Pengakuan pendapatan dan beban**

- a. Pengakuan pendapatan penjualan produk berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat penyerahan terjadi dan dinyatakan dengan bukti-bukti antara lain faktur dan berita acara penyerahan barang, sedangkan pengakuan pendapatan jasa berdasarkan kemajuan fisik dan dinyatakan dengan bukti berita acara.
- b. Pengakuan beban tahun berjalan berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat

## **19. Beban pinjaman**

Beban yang timbul atas pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang berupa bunga dan biaya lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya pinjaman tersebut, kecuali biaya pinjaman yang secara langsung dapat dikaitkan dengan perolehan, Konstruksi atau produksi suatu aktiva. Terhadap beban ini dikelompokkan tersendiri pada penyajian perhitungan laba rugi.

## **20. Pinjam meminjam sparepart**

- a. Pengembalian dalam bentuk barang.

Nilai hutang-piutang atas transaksi Pinjam meminjam sparepart disesuaikan dengan nilai master stock ledger pihak yang meminjamkan barang, dan pada saat penggantian nilai barang tersebut disesuaikan dengan nilai pada saat barang tersebut dipinjamkan, sehingga bagi yang meminjamkan tidak ada penilaian kembali terhadap barang tersebut.

Bagi pihak yang meminjam barang, selisih terhadap nilai barang pada saat pembelian atau pengembalian, perlakuan akuntansinya disesuaikan dengan periode pengembalian atau penggantianinya yaitu jika penggantianinya masih dalam periode yang sama dengan transaksi pinjam meminjam, maka diakui sebagai biaya produksi, dan jika tidak pada periode yang sama maka diakui sebagai biaya atau pendapatan lain-lain.

- b. Pengembalian dalam bentuk uang.

Nilai penggantian atas transaksi pinjam-meminjam sparepart ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dan dituangkan dalam nota debit yang diterbitkan pihak yang meminjamkan barang.

Selisih nilai barang pada saat pengembalian barang, baik yang meminjam maupun yang meminjamkan diakui sebagai pendapatan atau biaya lain-lain. Pajak-pajak yang timbul atas transaksi ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.